



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025–2029



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

DAFTAR TABEL II

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5

1.3 Maksud dan Tujuan..... 7

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10

2.1.1.Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah ..10

2.1.2.Sumber daya Perangkat Daerah 17

2.1.3.Kinerja pelayanan Perangkat Daerah 20

2.1.4.Kelompok sasaran layanan.....23

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPUPR.....23

2.2.1.Permasalahan 23

2.2.2.Isu Strategis 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 26

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 26

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 27

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 32

4.1. Perumusan, Rencana Pendanaan dan Sub Kegiatan Prioritas 32

4.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci .73

BAB V PENUTUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18

Tabel 2.2 Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan 19

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2020-2024 21

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 23

Tabel 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis 25

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR 28

Tabel 3.2 Strategi Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 29

Tabel 3.3 Penahapan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 29

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 31

Tabel 4.1 Perumusan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 33

Tabel 4.2 Rencana Pendanaan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 43

Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 64

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 74

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029 75

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Tarakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dari Tahun 2025 sampai 2029. Pada perjalanannya, renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Tarakan Tahun 2020 Nomor 60) dan peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kota Tarakan juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu untuk menginterpretasikan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada capaian IKU.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dilakukan dalam tahapan penyusunan RPJMD untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 226 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Tarakan serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja.

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya baik itu berupa sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, mengemukakan kinerja pelayanan dengan menjabarkan target maupun capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas tantangan atau hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, serta memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang, dan bidang pengairan sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, masing-masing bagian dan bidang mempunyai tugas dan

kewajiban sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penyusunan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga yang meliputi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan kota;
4. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;

7. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
10. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Jasa Konstruksi.

c) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung, prasarana perkotaan, dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. Seksi Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; dan
- c. Seksi Penataan Ruang.

d) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengairan Sumber daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Pengairan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengairan sumber daya air yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dan pantai dalam 1 (satu) Daerah;
4. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;

6. Pelaksanaan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
7. Pelaksanaan penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
9. Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
10. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
11. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
12. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai;
13. Pelaksanaan pengelolaan sistem hidrologi;
14. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
15. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
16. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dan Pantai;

17. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
18. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kota;
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengairan Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana bidang infrastruktur, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas.

Aparat Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang ada di dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

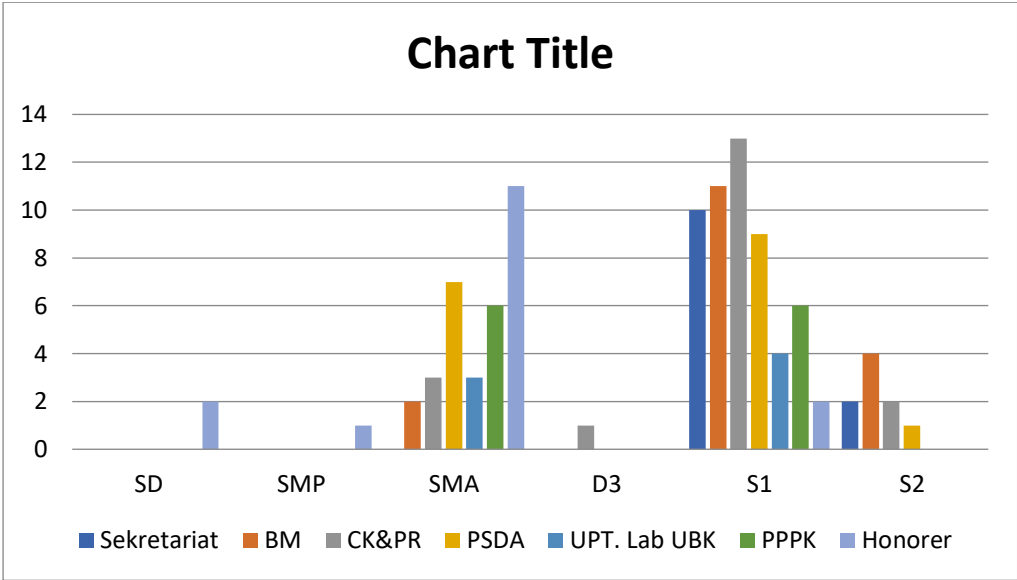
Tabel 2. 1
Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bagian/Bidang	Jumlah	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Sekretariat	12	4	8	0	0	0	0	0	10	2	-
2	Bina Marga	17	15	2	0	0	2	0	0	11	4	-
3	Cipta Karya dan Penataan Ruang	19	13	6	0	0	3	1	0	13	2	-
4	Pengairan Sumber Daya Air	17	13	4	0	0	7	0	0	9	1	-
5	UPT. Lab UBK	7	7	0	0	0	3	0	0	4	0	-
6	PPPK	12	10	2	0	0	6	0	0	6	0	-
7	Tenaga Honorer	16	12	4	2	1	11	0	0	2	0	-
Jumlah		100	74	26	2	1	32	1	0	55	9	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila ditinjau berdasarkan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan memiliki jumlah tenaga ASN dan honorer sebanyak 102 orang yang dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik Pegawai DPUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: DPUPR, 2025

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik. Namun, diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan prasarana penunjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Keterangan Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah
1	Bangunan Gedung	-	1	-	1
2	Sepeda Motor	6	7	2	15
3	Dump Truck	0	2	2	4
4	Mobil	0	7	1	8
5	Pick Up	0	0	1	1
6	Grader	0	0	1	1

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Keterangan Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah
7	Mesin Kompresor	0	0	1	1
8	Mesin Las Listrik	0	0	1	1
9	Picnometer	0	0	1	1
10	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	0	0	8	8
11	Laptop	8	12	4	24
12	Note Book	1	3	2	6
13	Printer	0	12	18	30
14	Scanner	8	0	0	8
15	CPU	0	5	3	8
16	Monitor	0	1	3	4
17	Lemari Es	0	0	1	1
18	Camera Film	0	0	0	0
19	Camera Video	0	0	9	9
20	Alat Penghancur Kertas	7	0	1	8
21	Waterpass	0	0	1	1
22	Theodolite	1	0	1	2
23	AC Central	0	0	9	9
24	AC Split	8	8	9	25
25	Televisi	1	1	4	6
26	Proyektor + Attachment	0	2	1	3
27	Lemari Arsip	0	89	7	96
28	Meja	95	0	34	129
29	Kursi	165	0	16	181
30	Pembersih Debu	0	0	0	0
31	Mesin Rumpuk	3	0	7	10
32	Mesin Absen	2	0	4	6

Sumber: DPUPR, 2025

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan meliputi:

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- *Sustainable Development Goal's (SDG's)*

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penilaian kinerja dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja berikut ini:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Kode	Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	80,00	81,5	81,5	81,5	NA	81,26		80,02	92,98		101,58%	0,00%	98,18%	114,09%
1.03.03	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	74,05%	74,38%	92,34%	95,62%	95,96%	55,79%	86,80%	92,89%	98,77%	83,21%	75,34%	116,69%	100,59%	103,29%	86,72%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,63%	72,75%	72,87%	72,99%	73,11%	0,00%	74,31%	74,17%	74,12%	76,17%		102,14%	101,79%	101,55%	104,19%
1.03.05	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,63%	72,75%	72,87%	72,99%	73,11%		74,31%	74,17%	74,12%	76,17%		102,14%	101,79%	101,55%	104,19%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16,67%	57,88%	72,73%	87,88%	100,00%	16,67%	60,61%	113,64%	257,58%	466,67%	99,98%	104,71%	156,24%	293,10%	466,67%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16,67%	57,88%	72,73%	87,88%	100,00%	16,67%	60,61%	113,64%	257,58%	466,67%	99,98%	104,71%	156,24%	293,10%	466,67%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	21,12%	45,00%	58,75%	82,50%	100,00%	21,12%	63,50%	62,34%	100,00%	100,00%	99,98%	141,11%	106,12%	121,21%	100,00%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	60,21%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%	70,08%	65,97%	67,38%	69,57%	70,58%	116,40%	108,77%	105,06%	106,00%	107,03%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	60,21%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%	70,08%	65,97%	67,38%	69,57%	70,58%	116,40%	108,77%	105,06%	106,00%	107,03%
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP	75/BB	74,93 BB	75/BB	75,00/BB	75,00/BB	79,09 BB	79,82 BB	79,82 BB	81,85 A	84,65 A	105,55%	106,53%	106,43%	0,00%	0,00%
		Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi Sesuai Standar SNI	N/A %	N/A%	100%	100%	100%			100%	100%	97%			100,00%	96,73%	

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2. 4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Kode	Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian pada Akhir Tahun				Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun (dalam ribu rupiah)				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun (dalam ribu rupiah)				Rasio Capaian pada Tahun					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Masyarakat Unsuran Pekerjaan Umum dan	722.085.828.145	194.664.294	255.892.418	179.210.694	179.837.793	0	191.655.535	191.650.995	314.498.518	262.226.676	-	98,45%	74,90%	175,49%	145,81%			
	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih	Perisentase Rumah Tangga yang dapat Mengakses Air Minum	226.404.865.000	59.223.740	69.668.680	58.265.323	68.991.665	0	58.771.303	58.771.303	41.523.450	40.839.807	-	99,24%	84,36%	71,27%	59,20%			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Volume tampungan air baku (meter3)	138.890.971.016	-	38.027.489	45.779.397	30.441.469	47.317.583	0	37.805.294	37.805.294	39.140.779	35.764.843	-	99,42%	82,58%	128,58%	75,58%		
1.03.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan embung dan penampung lainnya dan Unit air baku	138.090.971.016	-	38.027.489	45.779.397	29.841.469	47.317.583	0	37.805.294	37.805.294	39.140.779	35.764.843	-	99,42%	82,58%	131,16%	75,58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	800.000.000	-	0	0	600.000	0									0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.03.01	DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDOTAN AIR	Perisentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)	87.513.893.984	-	21.196.250	23.889.283	27.823.854	21.674.082	0	20.966.009	20.966.009	2.382.671	5.074.964	-	98,91%	87,76%	8,56%	23,41%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.03.01	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perisentase cakupan layanan pemecasaan jaringan distribusi Air Minum	87.513.893.984	-	21.196.250	23.889.283	27.823.854	21.674.082	0	20.966.009	20.966.009	2.382.671	5.074.964	-	98,91%	87,76%	8,56%	23,41%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.01	Meningkatnya pengendalian banjir	Perisentase Luas genangan banjir	40.524.589.694	-	16.879.524	25.084.518	8.600.000	8.600.000	0	16.672.823	16.672.823	31.327.967	33.685.049	-	98,78%	66,47%	364,28%	391,69%		
1.03.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Perisentase Luas Genangan Banjir (%)	40.524.589.694	-	16.879.524	25.084.518	8.600.000	8.600.000	0	16.672.823	16.672.823	31.327.967	33.685.049	-	98,78%	66,47%	364,28%	391,69%		
1.03.06.02	Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Luas Genangan Yang Tertangani (Ha)	40.524.589.694	-	16.879.524	25.084.518	8.600.000	8.600.000	0	16.672.823	16.672.823	31.327.967	33.685.049	-	98,78%	66,47%			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.04	Meningkatnya Sarana dan prasarana Persampahan	Perisentase TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	4.900.000.000	-	1.350.585	1.288.603	2.000.000	2.000.000	0	1.337.507	1.337.507	20.747.757	3.921.674	-	99,03%	103,80%	1037,39%	196,08%		
1.03.06.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Perisentase TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	4.900.000.000	-	1.350.585	1.288.603	2.000.000	2.000.000	0	1.337.507	1.337.507	20.747.757	3.921.674	-	99,03%	103,80%	1037,39%	196,08%		
1.03.06.04.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	4.900.000.000	-	1.350.585	1.288.603	2.000.000	2.000.000	0	1.337.507	1.337.507	20.747.757	3.921.674	-	99,03%	103,80%	1037,39%	196,08%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.01	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkotaan	Perisentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	89.398.561.424	-	18.137.034	38.601.608	37.964.190	813.501	0	17.409.145	17.409.145	102.066.996	26.992.118	-	95,99%	45,10%	268,85%	3318,02%		
1.03.09.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perisentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	115.275.091.275	-	27.245.484	43.974.327	18.280.869	29.500.000	0	27.242.153	27.242.153	34.717.009	0	-	99,99%	61,95%	189,91%	0,00%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase Peninggian jalan dengan kondisi mantap	190.848.968.804	-	60.509.967	62.061.089	39.935.268	55.867.583	0	59.527.019	59.527.019	72.293.325	143.951.110	-	98,38%	95,92%	181,03%	257,66%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase pembinaan jasa konstruksi	280.062.267	-	30.062	4.988	50.000	50.000	0	6.480	6.480	4.792	39.297	-	21,56%	129,90%	9,58%	78,59%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2.534.476.372	-	234.474	801.129	900.000	800.000	0	184.059	184.059	710.651	691.139	-	78,50%	22,97%	78,96%	86,39%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%		
1.03.09.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	89.398.561.424	-	18.137.034	38.601.608	37.964.190	813.501	0	17.409.145	17.409.145	102.066.996	26.992.118	-	95,99%	45,10%	268,85%	3318,02%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase Peninggian jalan dengan kondisi mantap	190.848.968.804	-	60.509.967	62.061.089	39.935.268	55.867.583	0	59.527.019	59.527.019	72.293.325	143.951.110	-	98,38%	95,92%	181,03%	257,66%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase pembinaan jasa konstruksi	280.062.267	-	30.062	4.988	50.000	50.000	0	6.480	6.480	4.792	39.297	-	21,56%	129,90%	9,58%	78,59%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2.534.476.372	-	234.474	801.129	900.000	800.000	0	184.059	184.059	710.651	691.139	-	78,50%	22,97%	78,96%	86,39%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%		
1.03.09.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	89.398.561.424	-	18.137.034	38.601.608	37.964.190	813.501	0	17.409.145	17.409.145	102.066.996	26.992.118	-	95,99%	45,10%	268,85%	3318,02%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase Peninggian jalan dengan kondisi mantap	190.848.968.804	-	60.509.967	62.061.089	39.935.268	55.867.583	0	59.527.019	59.527.019	72.293.325	143.951.110	-	98,38%	95,92%	181,03%	257,66%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase pembinaan jasa konstruksi	280.062.267	-	30.062	4.988	50.000	50.000	0	6.480	6.480	4.792	39.297	-	21,56%	129,90%	9,58%	78,59%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2.534.476.372	-	234.474	801.129	900.000	800.000	0	184.059	184.059	710.651	691.139	-	78,50%	22,97%	78,96%	86,39%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%		
1.03.09.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	89.398.561.424	-	18.137.034	38.601.608	37.964.190	813.501	0	17.409.145	17.409.145	102.066.996	26.992.118	-	95,99%	45,10%	268,85%	3318,02%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase Peninggian jalan dengan kondisi mantap	190.848.968.804	-	60.509.967	62.061.089	39.935.268	55.867.583	0	59.527.019	59.527.019	72.293.325	143.951.110	-	98,38%	95,92%	181,03%	257,66%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase pembinaan jasa konstruksi	280.062.267	-	30.062	4.988	50.000	50.000	0	6.480	6.480	4.792	39.297	-	21,56%	129,90%	9,58%	78,59%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2.534.476.372	-	234.474	801.129	900.000	800.000	0	184.059	184.059	710.651	691.139	-	78,50%	22,97%	78,96%	86,39%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%		
1.03.09.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.301.250.000	-	811.198	2.153.300	1.130.000	1.130.000	0	792.351	792.351	496.171	1.022.302	-	97,68%	36,80%	43,91%	90,47%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perisentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	89.398.561.424	-	18.137.034	38.601.608	37.964.190	813.501	0	17.409.145	17.409.145	102.066.996	26.992.118	-	95,99%	45,10%	268,85%	3318,02%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase Peninggian jalan dengan kondisi mantap	190.848.968.804	-	60.509.967	62.061.089	39.935.268	55.867.583	0	59.527.019	59.527.019	72.293.325	143.951.110	-	98,38%	95,92%	181,03%	257,66%		
1.03.09.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perisentase pembinaan jasa konstruksi	280.062.267	-	30.062	4.988	50.000	50.000	0	6.480	6.480	4.792	39.297	-	21,56%	129,90%	9,58%	78,59%		
1.03.09.01	PROGRAM PENATAAN DAN PENG																			

Berdasarkan tabel TC. 23 dan tabel 2.4 yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencakup masyarakat secara umum, khususnya kelompok penerima manfaat langsung seperti warga di area yang dilayani infrastruktur, serta instansi pemerintah daerah lainnya (desa/kelurahan, kecamatan, dll.) dan asosiasi profesi terkait. Ini mencakup semua lapisan masyarakat yang membutuhkan atau diuntungkan oleh pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, seperti akses transportasi, air bersih, sanitasi, dan ruang publik.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPUPR

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan diperlukan dalam perumusan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing bidang, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan. Permasalahan pembangunan yang mendesak yang akan dihadapi akan menentukan agenda sasaran serta program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Permasalahan yang akan dihadapi 2 tahun ke depan antara lain:

Tabel 2. 5 Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWEKANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLIHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Urusan Pekerjaan Umum			Keterbatasan anggaran dan tata kelola infrastruktur yang belum optimal memperlambat perbaikan pelayanan publik.	Ketimpangan kualitas dan cakupan infrastruktur antar wilayah dalam satu daerah menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat.	
Kota Tarakan memiliki sumber daya air yang melimpah, baik air permukaan maupun air tanah, yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air minum.	Belum optimalnya pelayanan air minum bagi masyarakat		Perubahan iklim global menyebabkan bencana alam lebih sering terjadi (banjir, kekeringan, tanah longsor) yang menguji ketahanan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sistem air bersih.			
	Masih rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi					
	Terbatasnya Kapasitas Unit pengambilan air baku perlu ditambah untuk suplai ke IPA					
	Ketersediaan Air Baku Belum dimanfaatkan secara maksimal					
Pemerintah daerah atau pusat memiliki potensi anggaran untuk dialokasikan pada perbaikan dan pemeliharaan drainase,	Masih adanya titik banjir di Kota Tarakan					
	Masih kurangnya proporsi dimensi saluran dan tingginya sedimentasi sehingga mengurangi kapasitas saluran untuk mengalirkan air serta semakin berkurang daerah resapan air	Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh				
	Banyak Perambahan Hutan/ Penebangan Pohon di bagian Hulu Pemukiman yang semakin banyak di pinggir sungai.					
	Masyarakat banyak yang belum sadar tentang kebersihan membuang sampah di dalam sungai					
	Masih rendahnya sanitasi Kota Tarakan					
	Masih rendahnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat					
Teknologi pengolahan air limbah domestik yang efektif dan efisien sudah tersedia, baik skala rumah tangga maupun komunal	Belum optimalnya Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik					
	Belum optimalnya sarana-prasarana persampahan					
	Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan					
Pemerintah kota memiliki potensi anggaran untuk dialokasikan pada perbaikan jalan	Masih adanya jalan yang tidak dalam kondisi mantap					
	Masih rendah ruas jalan dan jembatan kota dalam kondisi mantap					
	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya					
	Masih rendahnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis					
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang					
	Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang					
	Belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi					
	Masih rendahnya tingkat tertib penyelenggaraan jasa Konstruksi					
	Belum optimalnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah					
						Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur urusan pekerjaan umum

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan lingkaran Tarakan menjadi jalan strategis nasional (JSN) guna percepatan pembangunan ekonomi dan wisata
- b. Pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan.
- c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.

- d. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraaan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- e. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir
- f. Belum optimalnya pembangunan tanggul pengaman pantai untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat
- g. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
- h. Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- i. Belum optimalnya pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- j. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi
- k. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan
- l. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan berupaya melakukan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur urusan pekerjaan umum.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T-1 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		T-1 Indeks Kepuasan masyarakat	0	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
S-5 Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur dasar daerah		S-1 Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat	S-1 Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)	83,21%	87,73%	89,92%	92,01%	93,99%	95,87%	97,64%	
		S-2 16 Juni : Berkurangnya lokasi banjir	S-2 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (IKK)	66,12	68,37	74,56	79,90	84,80	86,45	88,17	
		S-3 Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat	S-3 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	53,55%	54,00%	54,81%	55,57%	56,31%	57,01%	57,67%	
		S-4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota	S-4 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	73,23 %	73,75%	74,28%	74,80%	75,32%	75,84%	76,36%	
S-6 Meningkatkan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S-5 Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang	S-5 Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indikator Baru	84,05	85,08	86,05	87,08	88,05	89,08	
		S-6 16 Juni : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	S-6 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	63,88%	14,17%	29,92%	45,67%	61,42%	77,17%	92,91%	
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S-7 Meningkatnya tata kelola DPUPR 22 Juli : perubahan oleh Bappeda Meningkatnya tata kelola OPD	S-7 Nilai/Predikat SAKIP OPD	86,39/A	87,13/A	88,87/A	89,61/A	90,35/A A	91,09/A A	92,83/A A	

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Terdapat 5 strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat melalui:
- Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum

- Peningkatan Kapasitas Layanan Unit Air Baku
2. Berkurangnya lokasi banjir melalui:
- Peningkatan layanan pengendalian banjir

- Peningkatan kinerja layanan drainase lingkungan

- 3. Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat melalui:
 - Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat
 - Peningkatan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota melalui :
 - Peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan kota
- 5. Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang melalui :
 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
 - Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata
 - Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis
- 6. Meningkatnya kualitas penyelenggaran jasa konstruksi melalui :
 - Peningkatan kinerja penyelenggaran jasa konstruksi
- 7. Meningkatnya tata kelola DPUPR melalui :
 - Peningkatan penguatan internal akuntabilitas kinerja
 - Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan

Strategi dan penahapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 5 (lima) tahun mendatang dicantumkan pada tabel 3. 2 dan table 3. 3 berikut ini.

Tabel 3. 2 Strategi Renstra DPUPR Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
		Peningkatan Kapasitas Layanan Unit Air Baku

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Berkurangnya lokasi banjir	Peningkatan layanan pengendalian banjir
		Peningkatan kinerja layanan drainase lingkungan
	Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat	Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat
		Peningkatan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan kota
	Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata
		Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi
	Meningkatnya tata kelola DPUPR	Peningkatan penguatan internal akuntabilitas kinerja
		Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra DPUPR Kota Tarakan

Tahun 2025-2029

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perluasan program pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak serta pembangunan kawasan pemerintahan terpadu	Perluasan program pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak serta pembangunan kawasan pemerintahan terpadu	Perluasan program pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak serta pembangunan kawasan pemerintahan terpadu	Peningkatan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak yang berkelanjutan	Peningkatan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak yang berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Pelaksanaan Pembangunan Unit Layanan Air Baku
3. Penyediaan pelayanan pengendalian banjir
4. Penyediaan layanan pengelolaan drainase lingkungan
5. Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat
6. Peningkatan ketersediaan layanan pengolahan sampah
7. Peningkatan penyelenggaraan jalan dan jembatan kota
8. Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi
9. Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
10. Peningkatan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis
11. Peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang
12. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 13 Th. 2023 ttg Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur 2. Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Handal	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air - PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai		Pelaksanaan Pembangunan Unit Layanan Air Baku	
			Penyediaan pelayanan pengendalian banjir	
	- Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 13 Th. 2023 ttg Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat		Penyediaan layanan pengelolaan drainase lingkungan	
			Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	
			Peningkatan ketersediaan layanan pengolahan sampah	
	- PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan		Peningkatan penyelenggaraan jalan dan jembatan kota	
	- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang		Peningkatan kinerja penyelenggaran jasa konstruksi	
	- PP no.16 th. 2021 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Th. 2002 ttg Bangunan Gedung		Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
			Peningkatan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	
	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		Peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	
		Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	
			Peningkatan dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	
			Peningkatan kinerja dan kompetensi ASN	
			Peningkatan Layanan Administrasi Umum	
			Peningkatan pendataan Barang Milik Daerah	
			Peningkatan Layanan Jasa Penunjang	
			Peningkatan Pendataan barang Milik Daerah	

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Perumusan, Rencana Pendanaan dan Sub Kegiatan Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategi pemerintah Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen pada instansi untuk pencapaian pada tahun tertentu. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Perumusan Renstra DPUPR Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T-1 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				T-1 Indeks Kepuasan masyarakat		KADIS
S-5 Meningkatnya Pemenuhan infrastruktur dasar daerah		S-1 Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat		S-1 Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)		KADIS	
			OC-1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		OC-1.1 Persentase peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	KABID CKPR
				OT-1.1.1 Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	OT-1.1.1 Jumlah SR yang terpasang (akumulasi)	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-1.1.1.5 Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	OT-1.1.1.5 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	JF CKPR
				OT-1.1.1.1 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	OT-1.1.1.1 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	JF CKPR
				OT-1.1.1.1.2 Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	OT-1.1.1.1.2 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	JF CKPR
				OT-1.1.1.1.4 Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	OT-1.1.1.1.4 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	JF CKPR
				OT-1.1.1.1.3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	OT-1.1.1.1.3 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	JF CKPR
			OC-1.2 Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku		OC-1.2 Rasio produksi unit air baku terhadap ketersediaan air baku	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	KABID PSDA
				OT-1.2.1 Terlaksananya Pembangunan Unit Layanan Air Baku	OT-1.2.1 Debit air baku yang tersedia	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JF PSDA
				OT-1.2.1.2 Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	OT-1.2.1.2 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01. 0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	JF PSDA
				OT-1.2.1.4 Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	OT-1.2.1.4 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	JF PSDA
				OT-1.2.1.1.1 Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	OT-1.2.1.1.1 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	JF PSDA
				OT-1.2.1.3 Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	OT-1.2.1.3 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	JF PSDA
				OT-1.2.1.5 Terehabilitasinya embung	OT-1.2.1.5 Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung	JF PSDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		S-2 Berkurangnya lokasi banjir			S-2 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (IKK)		KADIS
			OC-2.1 Meningkatnya layanan pengendalian banjir		OC-2.1 Luas genangan yang tertangani (ha)	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	KABID PSDA
				OT-2.1.1 Terlaksananya pelayanan pengendalian banjir	OT-2.1.1 Jumlah titik banjir yang tertangani	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF PSDA
				OT-2.1.1.2 Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	OT-2.1.1.2 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	JF PSDA
				OT-2.1.1.1.1 Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	OT-2.1.1.1 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	JF PSDA
				OT-2.1.1.3 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	OT-2.1.1.3 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	JF PSDA
			OC-2.2 Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan		OC-2.2 Persentase panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	KABID CKPR
				OT-2.2.1 Terlaksananya layanan pengelolaan drainase lingkungan	OT-2.2.1 Panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-2.2.1.1 Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	OT-2.2.1.1 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	JF CKPR
		S-3 Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat			S-3 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik		KADIS
			OC-3.1 Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat		OC-3.1 Persentase peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	KABID CKPR
				OT-3.1.1 Terselenggaranya pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	OT-3.1.1 Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF Air Limbah
				OT-3.1.1.5 Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	OT-3.1.1.5 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	JF CKPR
				OT-3.1.1.1.1 Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	OT-3.1.1.1 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	JF CKPR
				OT-3.1.1.6 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	OT-3.1.1.6 Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	JF CKPR
				OT-3.1.1.3 Tersedianya Unit pengolahan setempat	OT-3.1.1.3 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	JF CKPR
				OT-3.1.1.2 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	OT-3.1.1.2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	JF CKPR
				OT-3.1.1.4 Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	OT-3.1.1.4 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	JF CKPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
			OC-3.2 Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah		OC-3.2 Persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah (TPS3R)	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	KABID CKPR				
				OT-3.2.1 Meningkatnya ketersediaan layanan pengolahan sampah	OT-3.2.1 Jumlah layanan pengolahan sampah yang tersedia	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	JF Persampahan				
				OT-3.2.1.1 Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	OT-3.2.1.1 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	JF CKPR				
				OT-3.2.1.2 Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	OT-3.2.1.2 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	CKPR				
				S-4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota		S-4 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		KADIS			
			OC-4.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota		OC-4.1 1. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi baik 2. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi sedang 3. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak 4. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	KABID BM				
				OT-4.1.1 Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kota	OT-4.1.1 Rekapitulasi panjang jalan & jembatan yang dipelihara, direkonstruksi dan dibangun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	JF BM				
				OT-4.1.1.1 Terkelolanya Leger Jalan	OT-4.1.1.1 Terkelolanya Leger Jalan	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	JF BM				
				OT-4.1.1.2 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	OT-4.1.1.2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	JF BM				
				OT-4.1.1.3 Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	OT-4.1.1.3 Panjang Jalan/Jembatan yang di survey	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	JF BM				
				OT-4.1.1.9 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	OT-4.1.1.9 Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	JF BM				
				OT-4.1.1.4 Terlaksananya Pembangunan Jalan	OT-4.1.1.4 Panjang Jalan yang Dibangun	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	JF BM				
				OT-4.1.1.7 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	OT-4.1.1.7 Panjang Jalan yang terpelihara Berkala	1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	JF BM				
				OT-4.1.1.8	OT-4.1.1.8 Panjang Jembatan yang di rehabilitasi	1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan	JF BM				
				OT-4.1.1.6 Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	OT-4.1.1.6 Panjang Jalan yang di rekonstruksi	1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	JF BM				
				OT-4.1.1.5 Terlaksananya Pembangunan Jembatan	OT-4.1.1.5 Panjang Jembatan yang di bangun	1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	JF BM				
				S-6 Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S-5 Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang		S-5 Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		KADIS	
							OC-5.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		OC-5.1 Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	KABID CKPR
								OT-5.1.1 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.1 dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan menjadi Perda/Perkada 16 juni : Jumlah rencana tata ruang yang Ditetapkan	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang
								OT-5.1.1.1 Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	OT-5.1.1.1 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	JF CKPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-5.1.1.2 Terpenuhi-nya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	OT-5.1.1.2 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.3 Terpenuhi-nya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	OT-5.1.1.3 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.4 Terpenuhi-nya dokumen persyaratan untuk rapat koordinasi lintas sektor	OT-5.1.1.4 dokumen persyaratan untuk melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor	1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.5 Terpenuhi-nya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	OT-5.1.1.5 dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.6 Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	OT-5.1.1.6 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.7 Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	OT-5.1.1.7 Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.8 Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	OT-5.1.1.8 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.2 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.2 Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	1.03.12.2.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang
				OT-5.1.2.1 Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	OT-5.1.2.1 Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	JF CKPR
				OT-5.1.2.2 Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	OT-5.1.2.2 Jumlah Dokumen Materi Teknis RDTR	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.2.3 Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	OT-5.1.2.3 Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	JF CKPR
				OT-5.1.2.4 Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	OT-5.1.2.4 Jumlah materi teknis, ranperda RTRW Kabupaten/Kota dan KLHS RTRW	1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.3 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.3 Jumlah Dokumen KKPR yang diterbitkan	1.03.12.2.03 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang
				OT-5.1.3.1 Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	OT-5.1.3.1 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.3.1 Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	OT-5.1.3.1 Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.3.2 Tersedianya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	OT-5.1.3.2 Jumlah dokumen SPPR	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	JF CKPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-5.1.3.3 Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	OT-5.1.3.3 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.4 16 Juni : Jumlah Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang
				OT-5.1.4.1 Terlaksananya Audit Tata Ruang	OT-5.1.4.1 Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4.2 Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	OT-5.1.4.2 Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	JF CKPR
				OT-5.1.4.3 Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	OT-5.1.4.3 Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	JF CKPR
				OT-5.1.4.4 Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	OT-5.1.4.4 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4.5 Terlaksananya Penilaian Perwujudan RTR	OT-5.1.4.5 Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR	JF CKPR
				OT-5.1.4.6 Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	OT-5.1.4.6 Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4.7 Terlaksananya Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	OT-5.1.4.7 Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	JF CKPR
			OC-5.2 Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata		OC-5.2 Persentase Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang sesuai rencana penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	KABID CKPR
				OT-5.2.1 Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	OT-5.2.1 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	JF Bangunan
				OT-5.2.1.1 Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	OT-5.2.1.1 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.2.1.2 Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	OT-5.2.1.2 Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.2.1.3 Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	OT-5.2.1.3 Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	JF CKPR
						1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	JF CKPR
						1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	JF CKPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			OC-5.3 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		OC-5.3 Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	KABID CKPR
				OT-5.3.1 Tersedianya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	OT-5.3.1 Jumlah Bangunan Gedung yang Terbangun dan Terpelihara	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	JF Bangunan
				OT-5.3.1.1 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	OT-5.3.1.1 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.3.1.2 Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	OT-5.3.1.2 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.3.1.3 Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	OT-5.3.1.3 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	JF CKPR
		S-6 16 Juni : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi			S-6 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis		KADIS
			OC-6.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi		OC-6.1 Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	KABID BM
				OT-6.1.1 Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	OT-6.1.1 Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang terlatih	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	JF Jakon
				OT-6.1.1.1 Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	OT-6.1.1.1 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Seksi Jakon
				OT-6.1.1.3 Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	OT-6.1.1.3 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Seksi Jakon
				OT-6.1.1.4 Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	OT-6.1.1.4 Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Seksi Jakon
				OT-6.1.1.5 Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	OT-6.1.1.5 Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Seksi Jakon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-6.1.2 Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	OT-6.1.2 Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang tersedia	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	JF Jakon
				OT-6.1.2.1 Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	OT-6.1.2.1 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Seksi Jakon
				OT-6.1.2.2 Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	OT-6.1.2.2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.2.3 Meningkatkan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	OT-6.1.2.3 Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Seksi Jakon
				OT-6.1.2.4 Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	OT-6.1.2.4 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Seksi Jakon
				OT-6.1.3 Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	OT-6.1.3 Jumlah dokumen Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	JF Jakon
				OT-6.1.3.1 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	OT-6.1.3.1 Jumlah kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang terlaksana	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.3.2 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	OT-6.1.3.2 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.3.3 Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	OT-6.1.3.3 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Seksi Jakon
				OT-6.1.3.4 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	OT-6.1.3.4 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.3.5 Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	OT-6.1.3.5 Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Seksi Jakon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S-7 Meningkatnya tata kelola DPUPR			S-7 Nilai/Predikat SAKIP OPD		KADIS
			OC-7.1 Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		OT-7.1 Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				OT-7.1.1 Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	OT-7.1.1 Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubb ag PRK
				OT-7.1.1.1 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OT-7.1.1.1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubb ag PRK
				OT-7.1.1.2 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT-7.1.1.2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubb ag PRK
				OT-7.1.1.3 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	OT-7.1.1.3 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.03.01.2.01.0008Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kasubb ag PRK
				OT-7.1.2 Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	OT-7.1.2 Laporan Keuangan sesuai SAP	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubb ag PRK
				OT-7.1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OT-7.1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubb ag PRK
				OT-7.1.2.2 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OT-7.1.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.03.01.2.02.0002Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasubb ag PRK
			OC-7.2 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		OC-7.2 Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				OT-7.2.1 Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	OT-7.2.1 Rasio peningkatan kompetensi ASN	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.1.1 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	OT-7.2.1.1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.1.2 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OT-7.2.1.2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.1.3 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OT-7.2.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.2 Tersedianya Layanan Administrasi Umum	OT-7.2.2 Presentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.2.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OT-7.2.2.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.2.2 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	OT-7.2.2.2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.2.3 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	OT-7.2.2.3 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.2.4 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT-7.2.2.4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubb ag Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-7.2.3 Terkelolanya pendataan Barang Milik Daerah	OT-7.2.3 Jumlah barang yang terinventarisasi	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.3.1 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT-7.2.3.1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.3.2 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OT-7.2.3.2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.3.3 Tersedianya Alat Besar	OT-7.2.3.3 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.3.4 Tersedianya Mebel	OT-7.2.3.4 Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.3.6 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT-7.2.3.6 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.4 Tersedianya Layanan Jasa Penunjang	OT-7.2.4 Presentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.4.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OT-7.2.4.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.4.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OT-7.2.4.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.5 Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	OT-7.2.5 Jumlah barang yang terinventarisasi	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.5.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT-7.2.5.1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.5.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OT-7.2.5.2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.5.3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	OT-7.2.5.3 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.5.5 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OT-7.2.5.5 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.5.6 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT-7.2.5.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubb ag Umum
				OT-7.2.6 Tersedianya Laporan Uji Bahan Konstruksi	OT-7.2.5 Jumlah Laporan Uji Bahan Konstruksi	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka. UPT
				OT-7.2.3.5 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	OT-7.2.3.5 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabag Umum UPT
				OT-7.2.7 Tersedianya Laporan Alat Laboratorium yang Terkalibrasi dan Terakreditasi	OT-7.2.5 Jumlah Alat Laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka. UPT
				OT-7.2.5.4 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OT-7.2.5.4 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabag Umum UPT

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Tabel 4. 2 Rencana Pendanaan Renstra DPUPR
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					342.184.254.783		419.434.879.923		357.109.021.130		141.693.253.730		142.167.299.771
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.650.665.718		14.896.472.358		14.411.296.898		13.633.804.498		13.633.804.498
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	10.707.837.918	100%	10.707.837.918	100%	10.707.837.918	100%	10.707.837.918	100%	10.707.837.918
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84,00	85,00	86,00	3.942.827.800	87,00	4.088.634.440	88,00	3.603.458.980	89,00	2.825.966.580	90,00	2.695.966.580
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	3 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	9.000.000	7 Laporan	9.000.000	7 Laporan	9.000.000	7 Laporan	9.000.000	7 Laporan	9.000.000
1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000
1.03.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000
1.03.01.2.01.0008Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0,00	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.698.837.918		10.698.837.918		10.698.837.918		10.698.837.918		10.698.837.918
Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	Laporan Keuangan sesuai SAP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.698.837.918	12 Dokumen	10.698.837.918	12 Dokumen	10.698.837.918	12 Dokumen	10.698.837.918	12 Dokumen	10.698.837.918
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.812.638.644		9.812.638.644		9.812.638.644		9.812.638.644		9.812.638.644
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bln	84 Org/Bln	84 Org/Bln	9.812.638.644	84 Org/Bln	9.812.638.644	84 Org/Bln	9.812.638.644	84 Org/Bln	9.812.638.644	84 Org/Bln	9.812.638.644
1.03.01.2.02.0002Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					886.199.274		886.199.274		886.199.274		886.199.274		886.199.274
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	886.199.274	12 Dokumen	886.199.274	12 Dokumen	886.199.274	12 Dokumen	886.199.274	12 Dokumen	886.199.274
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian perangkat daerah					187.100.000		134.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	Rasio peningkatan kompetensi ASN	42,67%	45,24%	57,14%	187.100.000	69,05%	134.000.000	80,95%	100.000.000	92,86%	100.000.000	100,00%	100.000.000
1.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					10.600.000		0		0		0		0
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	2 Unit	10.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					76.500.000		34.000.000		0		0		0
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0,00	0,00	85 Stel	76.500.000	85 buah	34.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	6 Orang	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	6 Orang	100.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					284.175.720		278.175.720		278.175.720		278.175.720		278.175.720
Tersedianya Layanan Administrasi Umum	Presentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	100%	100,00%	100,00%	284.175.720	100,00%	278.175.720	100,00%	278.175.720	100,00%	278.175.720	100,00%	278.175.720
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	3 Paket	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.000.000
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					110.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45 Paket	47 Paket	47 Paket	110.000.000	47 Paket	130.000.000	47 Paket	130.000.000	47 Paket	130.000.000	47 Paket	130.000.000
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					63.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	5 Paket	5 Paket	63.000.000	5 Paket	37.000.000	5 Paket	37.000.000	5 Paket	37.000.000	5 Paket	37.000.000
1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.175.720		100.175.720		100.175.720		100.175.720		100.175.720
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	15 Laporan	13 Laporan	100.175.720	13 Laporan	100.175.720	13 Laporan	100.175.720	13 Laporan	100.175.720	13 Laporan	100.175.720
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.526.667.760		1.464.668.200		1.050.028.600		239.475.000		239.475.000
Terkelolanya pendataan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang terinventarisasi	14 Unit	67 Unit	49 Unit	1.451.667.760	49 Unit	1.364.668.200	41 Unit	950.028.600	40 Unit	139.475.000	40 Unit	139.475.000
Tersedianya Laporan Uji Bahan Konstruksi	Jumlah Laporan Uji Bahan Konstruksi	0%	29 Unit	150 Laporan	75.000.000	150 Laporan	100.000.000	150 Laporan	100.000.000	150 Laporan	100.000.000	150 Laporan	100.000.000
1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					655.087.000		0		0		0		0
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	1 unit	1 unit	655.087.000	0	0	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025 TARGET	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					650.000.000		0		792.000.000		0		0
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	0	1 Unit	650.000.000	1 Unit	0	1 Unit	792.000.000	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar					0		1.200.000.000		0		0		0
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	-	0	0	1 Unit	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel					17.500.000		17.500.000		0		0		0
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	17 Unit	5 Unit	17.500.000	5 Unit	17.500.000	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	29 Unit	29 Unit	75.000.000	29 Unit	100.000.000	29 Unit	100.000.000	29 Unit	100.000.000	29 Unit	100.000.000
1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					129.080.760		147.168.200		158.028.600		139.475.000		139.475.000
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	20 Unit	13 Unit	129.080.760	13 Unit	147.168.200	11 Unit	158.028.600	11 Unit	139.475.000	11 Unit	139.475.000
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					200.500.000		200.500.000		200.500.000		200.500.000		200.500.000
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang	Presentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	100%	100,00%	100,00%	200.500.000	100,00%	200.500.000	100,00%	200.500.000	100,00%	200.500.000	100,00%	200.500.000
1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000	1 Laporan	500.000
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.744.384.320		2.111.290.520		2.074.754.660		2.107.815.860		2.107.815.860
Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	Jumlah barang yang terinventarisasi	41 Unit	139 Unit	85 Unit	1.744.384.320	88 Unit	2.111.290.520	87 Unit	2.074.754.660	88 Unit	2.107.815.860	88 Unit	1.977.815.860
Tersedianya Laporan Alat Laboratorium yang Terkalibrasi dan Terakreditasi	Jumlah Alat Laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	12 Unit	45 Unit	45 Unit	100.000.000	45 Unit	100.000.000	45 Unit	105.000.000	45 Unit	130.000.000	45 Unit	130.000.000
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.353.931.720		1.135.931.720		1.194.435.860		1.194.435.860		1.194.435.860
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	29 Unit	16 Unit	1.353.931.720	16 Unit	1.135.931.720	16 Unit	1.194.435.860	15 Unit	1.194.435.860	15 Unit	1.194.435.860
1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					275.812.600		759.948.800		759.948.800		770.000.000		770.000.000
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0,00	2 Unit	3 unit	275.812.600	4 unit	759.948.800	4 unit	759.948.800	4 unit	770.000.000	4 unit	770.000.000
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000		100.000.000		105.000.000		130.000.000		130.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	45 Unit	45 Unit	100.000.000	45 Unit	100.000.000	45 Unit	105.000.000	50 Unit	130.000.000	50 Unit	130.000.000
1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		100.000.000		0		0		0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	4 Unit	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					13.640.000		14.410.000		14.370.000		12.380.000		12.380.000
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	58 Unit	20 Unit	13.640.000	22 Unit	14.410.000	21 Unit	14.370.000	18 Unit	12.380.000	18 Unit	12.380.000
1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					12.100.000.000		17.600.000.000		21.450.000.000		22.280.000.000		23.180.000.000
Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku	Rasio produksi unit air baku terhadap ketersediaan air baku	1,33	1,47	1,46	12.100.000.000	1,65	17.600.000.000	1,72	21.450.000.000	1,90	22.280.000.000	1,88	23.180.000.000
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					12.100.000.000		17.600.000.000		21.450.000.000		22.280.000.000		23.180.000.000
Terlaksananya Pembangunan Unit Layanan Air Baku	Debit air baku yang tersedia	865 l/detik	865 l/detik	865 l/detik	12.100.000.000	985 l/detik	17.600.000.000	1045 l/detik	21.450.000.000	1165 l/detik	22.280.000.000	1165 l/detik	23.180.000.000
1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya					8.770.000.000		14.900.000.000		17.750.000.000		18.580.000.000		19.080.000.000
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	12 unit (6 unit kolam + 12 Unit Air baku)	0	4 unit (1 unit kolam + 4 pengadaa n tanah)	8.770.000.000	5 unit (2 unit pembangu nan + 3 pengadaa n tanah)	14.900.000.000	3 unit (2 unit bangunan + 1 pengadaa n tanah)	17.750.000.000	1 unit	18.580.000.000	1 unit (lanjutan thn 2029)	19.080.000.000
1.03.02.2.01. 0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing					1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	-	0	4800 m	1.500.000.000	4000 m	1.500.000.000	4000 m	3.000.000.000	4000 m	3.000.000.000	4000 m	3.000.000.000
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya					480.000.000		1.000.000.000		300.000.000		100.000.000		500.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen (UKL UPL Embung Maya,FS Embung Maya	2 Dokumen	5 Dokumen	480.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	500.000.000
1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai					750.000.000		0		0		0		0
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	-	0	1 Dokumen	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 juni : 1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung					600.000.000		200.000.000		400.000.000		600.000.000		600.000.000
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1 unit	0	2 unit	600.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	400.000.000	2 unit	600.000.000	2 unit	600.000.000
1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					5.000.000.000		5.000.000.000		4.740.000.000		4.740.000.000		5.000.000.000
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan	Indikator Baru	7,17%	11,88%	5.000.000.000	16,59%	5.000.000.000	21,29%	4.740.000.000	26,00%	4.740.000.000	30,71%	5.000.000.000
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000.000		5.000.000.000		4.740.000.000		4.740.000.000		5.000.000.000
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah SR yang terpasang (akumulasi)	53113 Unit	3810 Unit	6310 Unit	5.000.000.000	8810 Unit	5.000.000.000	11310 Unit	4.740.000.000	13810 Unit	4.740.000.000	16310 Unit	5.000.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					260.000.000		0		0		0		260.000.000
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	2 Dok	1 Dokumen	260.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	260.000.000
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					0		0		0		0		0
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					4.740.000.000		4.740.000.000		4.740.000.000		4.740.000.000		4.740.000.000
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1903 SR	810 SR	1000 SR Tarakan Barat Tarakan Timur	4.740.000.000	1000 SR Tarakan Barat Tarakan Tengah	4.740.000.000	1000 SR Tarakan Barat Tarakan Tengah	4.740.000.000	1000 SR Tarakan Tengah Tarakan Utara	4.740.000.000	1000 SR Tarakan Utara	4.740.000.000
1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					0		260.000.000		0		0		0
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0	0	0	0	1 Unit	260.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					0		0		0		0		0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Indikator Baru	1 Unit	... Unit	0	... Unit	0	... Unit	0	... Unit	0	... Unit	0
1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional					10.299.000.000		12.032.000.000		10.699.000.000		5.000.000.000		5.100.000.000
Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah	Persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah (TPS3R)	19,28%	20,47%	21,67%	10.299.000.000	22,88%	12.032.000.000	24,08%	10.699.000.000	25,29%	5.000.000.000	26,49%	5.100.000.000
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					10.299.000.000		12.032.000.000		10.699.000.000		5.000.000.000		5.100.000.000
Meningkatnya ketersediaan layanan pengolahan sampah	Jumlah layanan pengolahan sampah yang tersedia	16 Unit	1 Unit	2 Unit	10.299.000.000	2 Unit	12.032.000.000	2 Unit	10.699.000.000	2 Unit	5.000.000.000	2 Unit	5.100.000.000
1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000
1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R					9.899.000.000		11.632.000.000		10.299.000.000		4.600.000.000		4.700.000.000
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	152,42 Ton/hari	152,42 Ton/hari	2,5 ton/hari	9.899.000.000	2,5 ton/hari	11.632.000.000	2,5 ton/hari	10.299.000.000	2,5 ton/hari	4.600.000.000	2,5 ton/hari	4.700.000.000
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					5.600.000.000		7.175.000.000		5.500.000.000		5.200.000.000		5.400.000.000
Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	Persentase peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Indikator baru	3,42%	4,10%	5.600.000.000	8,20%	7.175.000.000	12,30%	5.500.000.000	16,40%	5.200.000.000	20,49%	5.400.000.000
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.600.000.000		7.175.000.000		5.500.000.000		5.200.000.000		5.400.000.000
Terselenggaranya pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	44819	46354	48254 Rmh Tgg	5.600.000.000	50154 Rmh Tgg	7.175.000.000	52054 Rmh Tgg	5.500.000.000	53954 Rmh Tgg	5.200.000.000	55854 Rmh Tgg	5.400.000.000
1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					0		0		0		0		0
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	67 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	0	50 Rumah Tangga	0	50 Rumah Tangga	0	50 Rumah Tangga	0	50 Rumah Tangga	0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					200.000.000		400.000.000		200.000.000		0		200.000.000
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	200.000.000	0	0	1 Dokumen	200.000.000
1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat					5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Mohon di cek realisasi 2024-nya	35 Rmh Tgg	400 Rmh Tgg	5.000.000.000	400 Rmh Tgg	5.000.000.000	400 Rmh Tgg	5.000.000.000	400 Rmh Tgg	5.000.000.000	400 Rmh Tgg	5.000.000.000
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					0		0		0		0		0
Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	67 Rumah Tangga	35 Rmh Tgg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					200.000.000		200.000.000		300.000.000		200.000.000		200.000.000
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1 Unit	0	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000
1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					200.000.000		1.575.000.000		0		0		0
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Indikator Baru ?	0	0	200.000.000	1021,24	1.575.000.000	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					52.959.605.626		58.432.321.126		52.180.029.460		33.117.635.710		31.617.158.730
Meningkatnya layanan pengendalian banjir	Luas genangan yang tertangani (ha)	101,41	104,86 ha	114,36 ha	47.159.605.626	122,55 ha	54.207.321.126	130,07 ha	46.380.029.460	132,59 ha	28.117.635.710	135,23 ha	25.617.158.730
Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan	Persentase panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik	75,77%	78,98%	79,95%	5.800.000.000	80,65%	4.225.000.000	81,62%	5.800.000.000	82,45%	5.000.000.000	83,45%	6.000.000.000
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					52.959.605.626		58.432.321.126		52.180.029.460		33.117.635.710		31.617.158.730
Terlaksananya pelayanan pengendalian banjir	Jumlah titik banjir yang tertangani	Mohon di cek realisasi 2024-nya	6 DAS	9 DAS	47.159.605.626	10 DAS	54.207.321.126	7 DAS	46.380.029.460	5 DAS	28.117.635.710	5 DAS	25.617.158.730
Terlaksananya layanan pengelolaan drainase lingkungan	Panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik	227,14 km	236,78 km	239,68 km	5.800.000.000	241,79 km	4.225.000.000	244,69 km	5.800.000.000	247,19 km	5.000.000.000	250,19 km	6.000.000.000
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					34.834.005.626		48.892.321.126		42.380.029.460		22.667.635.710		19.667.158.730
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Mohon di cek realisasi 2024-nya	6 sistem	9 sistem	34.834.005.626	10 sistem	48.892.321.126	7 sistem	42.380.029.460	5 sistem	22.667.635.710	5 sistem	19.667.158.730
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					12.125.600.000		5.115.000.000		4.000.000.000		5.450.000.000		5.950.000.000
Terehabitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Mohon di cek realisasi 2024-nya	6 sistem	8 sistem	12.125.600.000	7 sistem	5.115.000.000	5 sistem	4.000.000.000	5 sistem	5.450.000.000	5 sistem	5.950.000.000
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					200.000.000		200.000.000		0		0		0
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan					5.800.000.000		4.225.000.000		5.800.000.000		5.000.000.000		6.000.000.000
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	62139 m	9638 m	2900 m	5.800.000.000	2113 m	4.225.000.000	2900 m	5.800.000.000	2500 m	5.000.000.000	3000 m	6.000.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung					149.195.752.813		199.036.252.813		156.045.752.813		10.244.252.813		10.724.252.813
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	466,67%	60,00%	21,88%	149.195.752.813	39,06%	199.036.252.813	59,38%	156.045.752.813	79,69%	10.244.252.813	100,00%	10.724.252.813
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					149.195.752.813		199.036.252.813		156.045.752.813		10.244.252.813		10.724.252.813
Tersedianya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	Jumlah Bangunan Gedung yang Terbangun dan Terpelihara	138 Bangunan Gedung	21	14	149.195.752.813	11	199.036.252.813	13	156.045.752.813	13	10.244.252.813	13	10.724.252.813
1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	4 Bangunan Gedung	800.000.000	4 Bangunan Gedung	800.000.000	4 Bangunan Gedung	800.000.000	4 Bangunan Gedung	800.000.000	4 Bangunan Gedung	800.000.000
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					147.795.752.813		197.636.252.813		154.645.752.813		8.844.252.813		9.324.252.813
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	136 Dokumen	29 Dokumen	23 Dokumen	147.795.752.813	16 Dokumen	197.636.252.813	57 Dokumen	154.645.752.813	22 Dokumen	8.844.252.813	22 Dokumen	9.324.252.813
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	251 Dokumen PBG	350 Dokumen	350 Dokumen	600.000.000	350 Dokumen	600.000.000	350 Dokumen	600.000.000	350 Dokumen	600.000.000	350 Dokumen	600.000.000

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan					63.889.305.626		71.212.908.626		64.538.016.959		42.662.635.709		43.197.158.730
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota	1. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi baik 2. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi sedang 3. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak 4. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	1. 56,42% 2. 16,81% 3. 15,39% 4. 11,38%	1. 56,82 % 2. 16,93 % 3. 5,09 % 4. 11,16 %	1. 57,23 % 2. 17,05 % 3. 14,79 % 4. 10,93 %	63.889.305.626	1. 57,63 % 2. 17,17 % 3. 14,49 % 4. 10,71 %	71.212.908.626	1. 58,03 % 2. 17,29 % 3. 14,19 % 4. 10,49 %	64.538.016.959	1. 58,43 % 2. 17,41 % 3. 13,89 % 4. 10,27 %	42.662.635.709	1.58,83 % 2.17,53 % 3.13,59 % 4.10,05 %	43.197.158.730
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					63.889.305.626		71.212.908.626		64.538.016.959		42.662.635.709		43.197.158.730
Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kota	Rekapitulasi panjang jalan & jembatan yang dipelihara, direkonstruksi dan dibangun	25,28 km	14,04 km	9,46 km	63.889.305.626	7,39 km	71.212.908.626	8,74 km	64.538.016.959	6,08 km	42.662.635.709	7,21 km	43.197.158.730
1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000
Terkelolanya Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Baru di anggarakan di tahun 2025	1 Dokumen / Tarakan	1 Dokumen / Tarakan	400.000.000	1 Dokumen / Tarakan	400.000.000	1 Dokumen / Tarakan	400.000.000	1 Dokumen / Tarakan	400.000.000	1 Dokumen / Tarakan	400.000.000
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen / Tarakan	1 Dokumen / Tarakan	100.000.000	1 Dokumen / Tarakan	100.000.000	1 Dokumen / Tarakan	100.000.000	1 Dokumen / Tarakan	100.000.000	1 Dokumen / Tarakan	100.000.000
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang di survey	232,558 km	232,558 km	233,272 km	350.000.000	233,272 km	350.000.000	233,272 km	350.000.000	233,272 km	350.000.000	233,272 km	350.000.000
1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan					27.709.157.047		31.400.000.000		29.706.720.996		10.750.337.244		10.000.000.000
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,60 km	1,13 km	2,80 km	27.709.157.047	0,73 km	31.400.000.000	1,07 km	29.706.720.996	0,67 km	10.750.337.244	0,62 km	10.000.000.000
1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan					0		5.600.000.000		0		0		0
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang di bangun	Baru dianggarkan ditahun 2025	0	0	0	14 Meter	5.600.000.000	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan					16.408.121.611		14.967.323.744		13.227.566.121		20.093.714.313		14.775.072.266
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di rekonstruksi	17,27 km	4,74 km	2,28 km	16.408.121.611	1,55 km	14.967.323.744	2,10 km	13.227.566.121	3,70 km	20.093.714.313	3,00 km	14.775.072.266
1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan					9.823.026.968		14.395.584.882		16.153.729.842		2.190.584.152		11.362.086.464
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara Berkala	5,80 km	5,69 km	3,37 km	9.823.026.968	4,09 km	14.395.584.882	4,56 km	16.153.729.842	0,70 km	2.190.584.152	2,58 km	11.362.086.464
1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan					6.099.000.000		1.000.000.000		1.600.000.000		5.778.000.000		3.210.000.000
0	Panjang Jembatan yang di rehabilitasi	76, Meter	23, Meter	16 Meter	6.099.000.000	6 Meter	1.000.000.000	16 Meter	1.600.000.000	16 Meter	5.778.000.000	8 Meter	3.210.000.000
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	1,53 km	2,47 km	1,00 km	3.000.000.000	1,00 km	3.000.000.000	1,00 km	3.000.000.000	1,00 km	3.000.000.000	1,00 km	3.000.000.000
1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi					950.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
Meningkatnya kinerja penyelenggaran jasa konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	100%	100,00%	100,00%	950.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.000.000.000
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					560.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000		570.000.000
Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang terlatih	Baru dianggarkan di tahun 2025	90 Orang	100 orang	560.000.000	100 orang	570.000.000	100 orang	570.000.000	100 orang	570.000.000	100 orang	570.000.000
1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi SertifikasiTenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					360.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Baru dianggarkan di tahun 2025	90 Orang	150 Orang	360.000.000	150 Orang	370.000.000	150 Orang	370.000.000	150 Orang	370.000.000	150 Orang	370.000.000
1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Baru dianggarkan di tahun 2025	30 Lembaga	30 Lembaga	150.000.000	30 Lembaga	150.000.000	30 Lembaga	150.000.000	30 Lembaga	150.000.000	30 Lembaga	150.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara ra Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Baru dianggarkan di tahun 2025	5 Orang	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000
1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					0		0		0		0		0
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Baru dianggarkan di tahun 2025	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000		250.000.000		250.000.000		275.000.000		275.000.000
Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang tersedia	Baru dianggarkan di tahun 2025	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	250.000.000	1 Layanan Informasi	250.000.000	1 Layanan Informasi	250.000.000	1 Layanan Informasi	275.000.000	1 Layanan Informasi	275.000.000
1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Baru dianggarkan di tahun 2025	1 Perangkat	1 Perangkat	50.000.000	1 Perangkat	50.000.000	1 Perangkat	50.000.000	1 Perangkat	50.000.000	1 Perangkat	50.000.000
1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	Baru dianggarkan di tahun 2025	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI					50.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Baru dianggarkan di tahun 2025	0	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	75.000.000
1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Baru dianggarkan di tahun 2025	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					2.229.925.000		2.239.925.000		2.189.925.000		2.139.925.000		2.139.925.000
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	Indikator Baru	16,67%	33,33%	2.229.925.000	50,00%	2.239.925.000	66,67%	2.189.925.000	83,33%	2.139.925.000	100,00%	2.139.925.000
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					740.000.000		539.925.000		289.925.000		689.925.000		400.000.000
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan menjadi Perda/Perkada	1 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	740.000.000	6 Dokumen	539.925.000	3 Dokumen	289.925.000	3 Dokumen	689.925.000	3 Dokumen	400.000.000
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					50.000.000		0		0		0		0
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0,00	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					100.000.000		50.000.000		0		0		0
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota					200.000.000		100.000.000		0		0		0
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		0		0		0
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					250.000.000		250.000.000		100.000.000		0		0
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	100.000.000	0	0	0	0
1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota					0		0		0		500.000.000		200.000.000
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Cek 2024	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	200.000.000
1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					40.000.000		39.925.000		89.925.000		89.925.000		100.000.000
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Cek 2024	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	39.925.000	1 Dokumen	89.925.000	1 Dokumen	89.925.000	1 Dokumen	100.000.000
1.03.12.2.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					630.000.000		900.000.000		350.000.000		250.000.000		239.925.000
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	0	1 Dokumen	3 Dokumen	630.000.000	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	350.000.000	0	250.000.000	2 Dokumen	239.925.000
1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar					350.000.000		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Baru	0	3 Dokumen	350.000.000	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					250.000.000		0		0		0		0
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang					30.000.000		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0	0	3 Orang	30.000.000	0	0	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					0		900.000.000		200.000.000		100.000.000		89.925.000
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0	0	0	0	2 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	89.925.000
1.03.12.2.03 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					380.000.000		300.000.000		550.000.000		400.000.000		450.000.000
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Jumlah Dokumen KKPR yang diterbitkan	3 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	380.000.000	5 Dokumen	300.000.000	5 Dokumen	550.000.000	5 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	450.000.000
1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang					150.000.000		150.000.000		250.000.000		200.000.000		150.000.000
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	0	1 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	150.000.000
1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					30.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Baru	0	100 Berkas	30.000.000	100 berkas	50.000.000	100 berkas	100.000.000	100 Berkas	100.000.000	100 berkas	100.000.000
1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					100.000.000		0		100.000.000		0		100.000.000
Tersedianya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen SPPR	3 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	100.000.000
1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0	2 Kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					479.925.000		500.000.000		1.000.000.000		800.000.000		1.050.000.000
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Jumlah Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	479.925.000	6 Dokumen	500.000.000	7 Dokumen	1.000.000.000	7 Dokumen	800.000.000	7 Dokumen	1.050.000.000
1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang					49.925.000		0		200.000.000		100.000.000		200.000.000
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Baru	0	1 Dokumen	49.925.000	0	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000
1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR					40.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Baru	0	1 Lokasi	40.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK					300.000.000		200.000.000		400.000.000		300.000.000		400.000.000
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Baru	1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	400.000.000
1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang					40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Baru	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000
1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR					0		0		0		0		0
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Baru	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	Baru	0	1 Dokumen /Berita Acara	50.000.000	1 Dokumen /Berita Acara	50.000.000	1 Dokumen /Berita Acara	50.000.000	1 Dokumen /Berita Acara	50.000.000	1 Dokumen /Berita Acara	50.000.000
1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang					0		100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
Terlaksananya Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Baru	0	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Tabel 4. 3 Sub Kegiatan Prioritas Renstra DPUPR
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.03.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	
			1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
			1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
			1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	
		Meningkatnya layanan pengendalian banjir	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	
	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR	

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DPUPR Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Melalui program ini ditargetkan untuk nilai atau predikat SAKIP DPUPR bisa dipertahankan pada predikat A dengan nilai yang diharapkan terus meningkat tiap tahunnya. Predikat SAKIP DPUPR ini menggambarkan hasil dan dampak nyata dari kegiatan yang dilakukan oleh DPUPR terhadap masyarakat.

Agar supaya kegiatan yang dilakukan oleh DPUPR dapat dilihat hasil dan dampak nyatanya oleh masyarakat, maka program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 9 program perbaikan kesejahteraan ASN, Tenaga Honor, Pensiunan, Kader Dasa Wisma dan Posyandu, melalui Jaminan kelancaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan uang lauk pauk (ULP) untuk ASN serta untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K) lingkup Pemerintah Kota Tarakan sesuai kemampuan daerah

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas layanan unit air baku melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan Kota; peningkatan bangunan perkuatan tebing untuk pencegahan longsor; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA).

Melalui program ini ditargetkan untuk dapat menambah jumlah long storage di tahun 2027 dan 2028 sebesar 4000 m³ pertahun melalui Sungai Bidang dan Sungai Indulung, dan penambahan volume air baku pada Embung Maya sebesar 125.000 m³ di tahun 2029.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat melalui kegiatan pembangunan, perluasan dan optimalisasi serta penyusunan rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) Perkotaan.

Melalui program ini ditargetkan untuk tiap tahun dapat melakukan penambahan sambungan rumah (SR) sebanyak 1.000 unit pertahun dan penambahan jaringan perpipaan sebanyak 5.800 m pertahun. Program ini juga merupakan program yang *tertagging* sebagai program untuk menjawab SPM urusan pekerjaan umum.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 07 program gratis pemasangan sambungan rumah air PDAM.

d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini dimaksudkan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah

melalui pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka meningkatkan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah untuk mencapai target indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah.

Melalui program ini ditargetkan untuk penambahan TPS3R sebanyak 1 unit pertahun, pemeliharaan TPS3R juga 1 unit pertahun, serta pengembangan TPA Juata Kerikil juga dilakukan bertahap tiap tahun.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 18 optimalisasi pengoperasian TPA Sampah Juata Kerikil dan TPS3R menuju Tarakan zero waste (bebas sampah).

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana tangki septik individual, pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), dan penyusunan rencana sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), serta pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Program ini juga merupakan program yang *tertagging* sebagai program untuk menjawab SPM urusan pekerjaan umum.

Pembangunan tangki septik individual ditargetkan dapat dipenuhi sebanyak 400 rumah pertahun untuk membantu dalam mengatasi rumah BABS dan rumah dengan sistem sanitasi yang belum layak.

Pembangunan instalasi lumpur tinja (IPLT) direncanakan akan dibangun pada tahun 2027 untuk dapat mencapai sanitasi aman karena hasil penyedotan dari tiap rumah sudah bisa diolah sebelum dibuang ke badan air.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dimaksudkan meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengendalikan banjir dan meningkatkan kinerja layanan drainase lingkungan melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan, optimalisasi sistem drainase lingkungan serta penyusunan rencana kebijakan strategis mengenai sistem drainase perkotaan.

Melalui program ini ditargetkan untuk menangani banjir dari tahun 2025 hingga tahun 2030 seluas 33,82 ha yang tersebar di beberapa titik dengan melakukan pembebasan lahan, pembangunan dan pemeliharaan saluran yang melalui 10 daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kota Tarakan.

Terdapat 6 dokumen rencana kebijakan strategis yang ditargetkan bisa diselesaikan hingga tahun 2030, salah satunya adalah penyusunan revisi raperda GSS.

Meningkatkan kinerja layanan drainase lingkungan dilakukan dengan kegiatan optimalisasi drainase-drainase permukiman baik yang kondisinya rusak maupun yang butuh perpanjangan pembangunan drainase lanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah panjang drainase lingkungan dalam keadaan baik, ditargetkan penambahan panjangnya sebesar 2.000 – 3.000 m tiap tahun.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari dua program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 5 program pemberdayaan rukun tetangga melalui dana alokasi khusus 50-200 juta per-RT pertahun untuk perbaikan infrastruktur drainase dan program nomor 11 program penuntasan masalah banjir

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang memenuhi standar teknis termasuk

memberikan perizinan dalam membangun bagi masyarakat, melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan strategis daerah dan kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin persetujuan pembangunan bagi masyarakat.

Pembangunan dan pemeliharaan bangunan strategis daerah melalui pembangunan dan pemeliharaan kantor-kantor pelayanan publik yang dalam 5 tahun ini difokuskan pada wilayah pusat pemerintah baru di Kelurahan Juata Laut.

Kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin persetujuan pembangunan bagi masyarakat ditargetkan dapat dikeluarkan 350 izin tiap tahunnya, mengingat beberapa hal sudah dimudahkan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 20 pembangunan kawasan terpadu pusat pemerintahan Kota Tarakan.

h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata, dalam artian memiliki dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang adaptif, penataan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya, serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan.

Selama 5 tahun ini ditargetkan untuk menyelesaikan 10 dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan, 18 kawasan yang tertata, serta 120 dokumen pembinaan/pengawasan yang dikeluarkan tiap tahunnya.

i. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

jalan kota yang meliputi kegiatan pengelolaan leger jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jembatan, pemeliharaan rutin jalan, dan penyusunan rencana kebijakan strategi pengembangan jaringan jalan.

Melalui program ini ditargetkan untuk penambahan jalan dalam kondisi mantap sebesar 1,2 km pertahun, penambahan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,93 km pertahun, penambahan jalan dalam kondisi baik sedang sebesar 0,278 km pertahun, pengurangan jalan dalam kondisi rusak sebesar 0,698 km pertahun.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 12 program kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan kota dan jembatan.

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Melalui program ini ditargetkan peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di Kota Tarakan sebanyak 100 orang pertahun, yang akan dilayani melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi, pembinaan serta pengawasan bagi usaha jasa konstruksi.

k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang melalui kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

Melalui program ini ditargetkan kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebesar 100 dokumen tiap tahun, agar kegiatan pembangunan atau usaha tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah, mencegah terjadinya konflik antar pengguna ruang sehingga pembangunan dapat berjalan harmonis

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta profesional di sektor jasa konstruksi, termasuk pelatihan, seminar, dan workshop, untuk menghasilkan bangunan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Program ini juga mencakup peningkatan penerapan standar dan regulasi, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja, dan pengembangan teknologi serta produk dalam negeri.

4.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)		(4)	(6)	(8)	(10)	(12)
1	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	NA	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
2	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)	Persen	83,21%	87,73%	89,92%	92,01%	93,99%	95,87%	97,64%
3	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (IKK)	Persen	66,12	68,37	74,56	79,90	84,80	86,45	88,17
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Persen	53,55%	54,00%	54,81%	55,57%	56,31%	57,01%	57,67%
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	73,23 %	73,75%	74,28%	74,80%	75,32%	75,84%	76,36%
6	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indeks	Indikator Baru	84,05	85,08	86,05	87,08	88,05	89,08
7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	63,88%	14,17%	29,92%	45,67%	61,42%	77,17%	92,91%
8	Nilai/Predikat SAKIP OPD	Nilai	86,39/A	87,13/A	88,87/A	89,61/A	90,35/AA	91,09/AA	92,83/AA

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau program, yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. IKK berfungsi sebagai cerminan prioritas strategis organisasi, mengukur sejauh mana kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dicapai secara terukur dan relevan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	IKK	SATUAN	Base Line	TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	66,12	68,37	74,56	79,90	84,80	86,45	88,17	IKU
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	80,52%	75,38%	75,38%	81,88%	88,38%	88,38%	96,92%	Penurunan target karena ada penambahan kawasan rawan banjir ROB
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak ada Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%		5,74%	5,74%	5,74%	8,55%	8,55%	19,98%	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,21%	87,73%	89,92%	92,01%	93,99%	95,87%	97,64%	IKU
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	69,08%	71,44%	73,02%	74,52%	75,94%	77,29%	78,56%	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%		87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	73,23 %	73,75%	74,28%	74,80%	75,32%	75,84%	76,36%	IKU
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	63,88%	14,17%	29,92%	45,67%	61,42%	77,17%	92,91%	IKU
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0,00%	17,78%	35,55%	53,33%	71,11%	85,55%	100,00%	2024 belum ada
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari		20 hari	20 hari	20 hari	20 hari	20 hari	20 hari	sesuai SOP dan standar pelayanan penerbitan KKPR
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%		0,00%	12,50%	31,25%	43,75%	62,50%	81,25%	Target berdasarkan hasil audit Tata Ruang

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

BAB V PENUTUP

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tarakan, September 2025
Kepala Dinas,



FANDARIANSYAH, S.T., M.T.
NIP. 19710508 199803 1 009